

DINAMIKA ISLAM POLITIK PASCA ORDE BARU PERSPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK

Asep Saeful Muhtadi**

Abstrak

Wacana Islam politik di Indonesia hampir selalu menarik perhatian banyak kalangan. Alasannya sederhana. Selain Islam merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam juga merupakan ajaran yang memberikan poin penting dalam masalah politik (siyasah). Karena itu, kaitan antara Islam dan politik senantiasa memperlihatkan catatan penting khususnya dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Perdebatan tentang dasar negara menjelang dan pasca kemerdekaan republik ini merupakan catatan yang sulit dilepaskan dari perjalanan sejarah Islam politik berikutnya. Ketika sejumlah pasal UUD 1945 diamandemen mengikuti era baru politik Indonesia, muncul pula ke permukaan isu sejarah lama yang menggarisbawahi cita-cita politik Islam yang pernah mengemuka hangat dalam majelis konstituante. Bahkan, partai-partai politik yang lahir setelah berakhirnya kekuasaan orde baru, banyak di antaranya yang masih kuat mengikatkan salah satu akar kepengikutannya pada komunitas Islam.

Tulisan ini selanjutnya difokuskan pada analisis atas variabel pergulatan Islam politik khususnya pasca runtuhnya kekuasaan orde baru. Sejarah perjalanan politik nasional yang dari waktu ke waktu hampir selalu melibatkan umat Islam telah mendorong tumbuhnya komunikasi politik intern dan antar kekuatan sosial politik yang ada. Sebab, seperti digambarkan Althoff (1997: 255), komunikasi politik sendiri merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik; dan proses sosialisasi, partisipasi, serta proses rekrutmen secara praktis tergantung pada komunikasi.

Kata Kunci : Islam, Politik, dan Pasca Orde Baru.

** **Dr. Asep Saeful Muhtadi.**, adalah dosen Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pendahuluan

Kemenangan SBY-JK pada Pemilu kedua pasca orde baru secara sederhana memperlihatkan fenomena lain dari karakteristik masyarakat pemilih. Salah satu yang menarik dari karakteristik tersebut adalah warna religiusitas masyarakat yang menjadi cermin mayoritas penduduk Indonesia. Dalam konteks komunikasi politik, karakteristik masyarakat ini merupakan medan komunikasi yang sangat menentukan efektifitas proses. Pengalaman politik di Indonesia memperlihatkan bahwa pesan-pesan politik akan mudah dirumuskan dalam kemasan agama. Polarisasi sasaran komunikasi juga akan mudah dibaca dalam simpul komunitas yang relatif homogen, yaitu umat beragama. Karena itu, tidak heran jika lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti pesantren dan ormas-ormas Islam hampir selalu menjadi sasaran tembak partai-partai politik pada setiap kali menjelang pemilu.

Keputusan Wiranto memilih Shalahudin Wahid dan Megawati memilih Hasyim Muzadi untuk mendampingi mereka pada pemilihan presiden/wakil presiden, salah satunya, adalah karena pertimbangan bahwa keduanya merupakan representasi dari ormas Islam terbesar di Indonesia. Dua figur kyai inilah yang dalam konteks komunikasi merupakan pesan nonverbal yang mudah dicerna masyarakat sasaran. Keduanya bukan hanya berperan sebagai komunikator, tapi juga menjadi pesan yang digunakan masing-masing calon presiden sebagai komunikatonya. Di tengah semangat primordialisme masyarakat Muslim, Islam menjadi simbol komunikasi yang sering mendominasi proses penyampaian pesan-pesan politik. Kain sorban dan peci hitam pun sering menjadi pakaian penting para politisi ketika membutuhkan dukungan massa yang *nota-bene* mayoritas beragama Islam.

Dalam proses seperti itu, gairah politik umat ini akhirnya menjadi kenyataan yang oleh sebagian pihak dianggap telah menyimpang dari garis perjuangan sebelumnya. Tahun 1984 Nahdlatul Ulama (NU) merasa perlu mengingatkan warganya dengan menyerukan kembali kepada *Khittah 1926*. Muhammadiyah, meskipun sering terkesan ragu-ragu, juga tetap memberikan garis pemisah untuk membatasi partisipasi langsung setiap warganya yang sudah terlanjur memasuki ruang politik praktis. Persentuhan Islam-kekuasaan pun tidak bisa dihindari, sehingga orientasi sejumlah kekuatan Islam, terutama setelah mencairnya hegemoni politik orde baru, tampak mengalami pergeseran cukup signifikan.

Islam, Demokrasi, dan Politik di Indonesia

Untuk tidak terlalu jauh menelusuri jejak sejarah ke belakang dalam melihat persentuhan antara Islam, demokrasi, dan politik di Indonesia, secara dramatis tulisan ini akan melihat pada momen runtuhnya kekuasaan orde baru. Perubahan signifikan perpolitikan di Indonesia terjadi sejak turunnya penguasa orde baru, Soeharto, 21 Mei 1998. Gelombang tuntutan reformasi politik yang merebak menyusul terbentuknya kabinet baru hasil pemilu 1997 akhirnya semakin terfokus pada persoalan pergantian kepemimpinan nasional hasil Sidang Umum MPR tahun 1998. Hal ini tampaknya bermula dari semakin merosotnya kredibilitas para pimpinan eksekutif dan legislatif serta krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan. Termasuk, alternatif *reshuffle* kabinet seperti ditawarkan pemerintah saat itu, tampaknya juga tidak sanggup menyelesaikan persoalan bangsa.

Untuk melihat hubungan-hubungan yang saling berkaitan antara variabel-variabel Islam, demokrasi, dan politik di Indonesia, ada yang menarik untuk didiskusikan, mengapa semua Fraksi di DPR hampir sepanjang sejarah orde baru selalu mengajukan nama Cawapres yang sama untuk dipilih hampir pada setiap Sidang Umum MPR. Kalau saya membalak-balik mengapa Habibie yang terpilih menjadi calon kuat pada SU-MPR 1998, di situ ada isyarat politik yang saat itu banyak dibicarakan orang. Saya kira, terpilihnya Habibie bukan semata-mata sesuai dengan salah satu kriteria yang sudah dirumuskan, yaitu “memiliki wawasan teknologi”.

Apa yang menarik dari fenomena munculnya Habibie pada percaturan politik di Indonesia saat itu? Meminjam sistematika analisis Douglas E. Ramage dalam bukunya *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*, fenomena di atas seolah-olah memperlihatkan dua sisi yang cukup dominan mewarnai diskursus politik Indonesia saat itu, yaitu “civil” dan “Islam”. Dua sisi ini sebetulnya merupakan lagu lama yang masih tetap dianggap *up-to-date*. Isu civil dan Islam memang telah membuka jalan perdebatan politik sejak *the founding fathers* memikirkan format negara yang akan segera lahir pasca kolonialisme tahun 1945. Isu civil yang hampir selalu digandengkan dengan militer, dan Islam yang hampir selalu diidentifikasi sebagai komando jihad, saya kira, sudah merebak sejak awal kemunculan orde baru.

Keadaan seperti ini pada akhirnya telah melahirkan fenomena yang kurang seimbang khususnya antara civil dan militer. Itulah sebabnya, salah satu usaha untuk membangun keseimbangan kekuatan sosial politik ini,

muncul, misalnya, gagasan pemberdayaan masyarakat civil (*civil society empowerment*), dengan maksud utamanya untuk memperkuat bangunan masyarakat civil sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang khususnya dalam proses demokratisasi politik. Penguatan masyarakat civil kemudian menjadi agenda penting terutama untuk menuju tatanan Indonesia baru yang lebih demokratis. Jadi, keinginan untuk memberikan perimbangan kekuatan politik yang diperankan oleh militer, sebetulnya sudah sejak lama muncul dalam pemikiran, meskipun sulit diimplementasikan mengingat figur puncak pimpinan nasional orde baru tetap dipegang seorang jenderal yang sekaligus menjadi panglima tertinggi.

Sedangkan isu “Islam” yang dikaitkan dengan perjalanan politik di Indonesia, terutama menguat sejak diumumkannya susunan kabinet 1993-1998 lima tahun sebelumnya. Kabinet Pembangunan VI yang dikesani sangat berpihak pada kalangan Muslim saat itu telah mengandung “kecemburuan” yang hampir sulit dikendalikan. Meskipun, bagi kalangan Muslim sendiri, kenyataan itu tidak disikapi sebagai sesuatu yang final dan sangat menggembirakan. Ia bahkan mengisyaratkan satu tantangan besar, baik menyangkut prestasi kerja yang diperankannya maupun menyangkut sentimen primordial yang sangat sensitif di tengah pluralitas masyarakat. Menanggapi masalah itu, lewat berbagai media massa, misalnya, sejumlah opini merebak dalam berbagai tema seperti “Penghijauan Kabinet”, “Penghijauan Beringin”, “Santrinisasi Golkar”, dan lain sebagainya. Sejak itulah Islam sebagai salah satu kekuatan politik “kembali” muncul ke permukaan setelah beberapa periode sebelumnya yang seakan-akan tenggelam terkubur dalam lubang “kekalahan”.

Simbol Islam menjadi komoditas politik yang relatif paling laris terutama ketika politik membutuhkan legitimasi publik yang lebih besar. Kampanye pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan komunikasi politik, juga sangat diwarnai oleh simbol agama. Berbagai pernyataan politik seolah-olah belum sempurna sebelum dilengkapi argumen kitab suci dan disampaikan oleh figur agamawan. Sosialisasi politik melalui penataran P4 pun sarat dengan nuansa agama formal. Semua sila yang menjadi pesan utamanya penuh dengan dalil-dalil kitab suci yang akrab dengan kultur masyarakat Muslim. Simbol Islam menjadi saluran komunikasi politik yang mewarnai percaturan politik orde baru.

Islam muncul dalam pergumulan politik di Indonesia, sebetulnya bukan saja karena tuntutan perjalanan sejarah yang pernah, sedang, dan akan

dilaluinya. Tetapi pada saat yang sama, karena Islam juga memiliki nilai-nilai yang oleh para penganutnya diyakini sebagai norma, batasan, atau bahkan sebagai etika yang secara normatif membimbing keterlibatannya dalam kehidupan politik. Karena itu, dalam beberapa hal, kehidupan Nabi beserta para sahabatnya ketika membina masyarakat Madinah, misalnya, seringkali dipandang sebagai perilaku politik Nabi yang menjadi dasar pembinaan masyarakat pada zaman-zaman selanjutnya. Termasuk masyarakat (Muslim) Indonesia pada orde pembangunan saat itu. Bahkan pemikiran-pemikiran politik Ibnu Taimiyah yang pernah dirumuskannya dengan mendasarkan pada tuntutan empirik juga sering dijadikan rujukan penting dalam perbincangan-perbincangan politik khususnya di Indonesia. Buah pemikiran klasik itulah yang kemudian menjadi rujukan untuk melegitimasi model kepemimpinan yang dikehendakinya.

Kalau saya pahami, Ramage memang tidak hanya menyebutkan dua sisi yang saat itu menjadi tema besar dalam persoalan politik di Indonesia. Ia sebetulnya mengisyaratkan adanya tiga kekuatan sosial politik yang saat itu cukup mewarnai mekanisme politik di Indonesia, yaitu: Islam, Birokrasi, dan Militer. Tapi, menariknya lagi, justru saya melihat bahwa ketiga-tiganya juga pada akhirnya akan berujung pada satu tema yang sama, yaitu Islam. Selain Islam sendiri telah membentuk satu kekuatan politik, pada birokrasi dan militer pun pada dasarnya terdapat sejumlah figur Muslim. Di sinilah arti strategisnya posisi “Islam” sebagai tema sentral pergumulan politik di Indonesia. Jika Islam pernah menjadi tema yang kurang menguntungkan dalam perbincangan tentang politik di Indonesia, maka pada saat itu dapat dipandang sebaliknya, Islam bisa menjadi tema yang tidak pernah absen hampir dalam setiap perbincangan tentang politik di Indonesia.

Partai Politik Baru: Artikulasi Islam Politik

Tidak lama sejak dibukanya kembali pintu kebebasan mendirikan partai politik menjelang Pemilu 1999, lahir lebih dari seratus partai politik. *Euphoria* politik ini muncul sebagai respon atas kebebasan berekspresi politik yang telah lama terpasung selama pemerintahan orde baru. Gerakan reformasi telah membuka iklim politik yang sebelumnya begitu angker, pengap, dan mampet. Selama orde baru, memasuki dunia politik tidak lebih dari melayani Soeharto dan Golkar. Jangankan berani mendirikan partai politik, baru punya keinginan saja untuk merumuskan cita-cita politik di luar jaring kekuasaan politik orde baru, bisa dituduh macam-macam, termasuk

dituduh subversif. Akibatnya, rakyat tidak lagi memiliki ruang yang memadai untuk menyalurkan gairah politiknya secara bebas, setara, dan seimbang dengan kekuasaan. Reformasi lah yang kemudian berhasil merubah wajah politik Indonesia yang salah satunya ditandai dengan terbukanya kebebasan mendirikan partai.

Dari kalangan Islam, dalam waktu singkat, lahir tidak kurang dari dua puluh lima partai politik, yang secara eksplisit maupun implisit memperlihatkan identitas keislamannya. Sepintas, kelahiran sebagian besar partai-partai itu tampak memiliki akar ideologis yang kuat pada sejarah kepartaian yang pernah mewarnai politik nasional ketika pertama kali pemilu diselenggarakan tahun 1955. Termasuk fenomena lahirnya partai-partai yang memiliki basis keislaman sebagai akar konstituennya.¹ Hal ini terlihat dalam iklim komunikasi politik ketika partai-partai yang akan ikut bertarung itu mulai mempromosikan eksistensinya. Meskipun jadwal formal pelaksanaan kampanye saat itu belum digelar, ketegangan sosial mulai menjadi warna komunikasi politik yang biasa timbul dalam ruang ideologis masyarakat plural seperti halnya di Indonesia.

Jika menggunakan kategorisasi modernis-tradisionalis yang menjadi alat pengikat di antara para pengikut Muslim, dapat disebutkan sejumlah partai politik lahir mengikuti kategorisasi itu. Dari kalangan kaum modernis lahir Partai Bulan Bintang (PBB) yang lebih dikesani sebagai perwujudan baru kekuatan Masyumi. Pimpinannya sendiri, Yusril Ihza Mahendra, ketika itu, banyak disebut-sebut sebagai *Natsir* “Muda” karena gairah politiknya yang kuat membangkitkan memori politik Masyumi. Bahkan ada pula yang secara eksplisit menyebut kata Masyumi sebagai nama partai baru ini, seperti Partai Politik Islam Indonesia Masyumi pimpinan Abdullah Hehamahua. Partai lain yang juga menyandarkan namanya pada semangat Masyumi adalah Partai Masyarakat Umat Muslimin Indonesia Baru, disingkat Partai Masyumi Baru. Partai yang digagas oleh Ridwan Saidi ini juga menetapkan Islam sebagai azas partai, sekaligus mengklaim massa dan simpatisan Partai

¹ Yang disebut Partai-partai Islam di sini seperti terlihat pada anak judul di atas, sebetulnya merupakan penyederhanaan dari “partai yang lahir dari rahim komunitas yang beragama Islam” (*Muslim-based Party*). Memang ada kontroversi di kalangan Muslim sendiri. Apakah partai-partai yang dideklarasikan secara formal sebagai partai Islam itu adalah partai yang berasaskan hukum dan atau syari’at Islam atau hanya sebatas wadah berpolitikanya orang-orang Islam?

Masyumi yang pernah berperan pada Pemilu 1955 serta kader-kader HMI dan PII sebagai sasaran konstituennya.

Nama Masyumi memang menjadi simbol komunikasi politik yang juga digunakan untuk menunjukkan identitas perjuangan partai Islam pasca orde baru. Ketiga partai di atas bukan saja menggunakan nama yang hampir sama, tapi juga menggunakan simbol yang sama, Bulan Bintang, dengan sedikit perbedaan modifikasi seperti posisinya yang menghadap ke atas atau ke pinggir. Semangat memunculkan nama Masyumi ini tampaknya dilatarbelakangi oleh sejarah kebesaran partai pada Pemilu 1955, meskipun sesungguhnya era politik Indonesia telah memperlihatkan pergeseran yang cukup signifikan jika dibandingkan antara dekade 50-an dengan 90-an. Bahkan, boleh jadi, perbedaan era ini pula yang seolah kurang diperhatikan para pendiri partai, sehingga kelahiran partai-partai itu cenderung lebih mencerminkan romantisme sejarah politik masa lalu, sementara gempita partai-partai ideologis keagamaan pun lahir sekedar mengikuti kebebasan berpolitik yang kembali terbuka lebar setelah terpasung lebih dari dua puluh tahun selama kekuasaan orde baru.

Pengambilan nama-nama besar yang pernah menggariskan sejarah perpolitikan Indonesia ini pada dasarnya dapat saja disebut sebagai alat komunikasi politik terutama untuk membangkitkan emosi primordial para calon pemilihnya. Ketika kesempatan mendirikan partai itu terbuka, memang masih ada lapisan generasi yang pernah hidup sezaman dengan Masyumi,² bahkan ikut terlibat dalam pergumulan politik aliran pada momentum Pemilu 1955. Lebih dari itu, generasi yang baru lahir tidak lama setelah Masyumi tenggelam, sebetulnya masih menerima pendidikan politik melalui informasi sejarah perjuangan umat Islam yang biasa diungkap melalui proses pengkaderan organisasi-organisasi Islam seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Gerakan Pemuda Islam (GPI). Jadi, terdapat kontinuitas informasi historis yang ikut membentuk

² Paparan agak rinci berkaitan dengan munculnya kembali semangat Masyumi menjelang Pemilu 1999 antara lain diberikan Musa Kazhim ketika mengantarkan profil Partai Bulan Bintang (PBB) dalam buku *5 Partai dalam Timbangan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999). Bahkan secara eksplisit Kazhim memperlihatkan keterikatan historis Masyumi-DDII-PBB. Kelahiran DDII 1967 dilihat sebagai ikhtiar beberapa eks tokoh Masyumi seperti Mohammad Natsir dan Anwar Harjono dalam memelihara “cita-cita politik” Masyumi, sehingga ketika PBB lahir, cita-cita itu pun berusaha diwadahi partai ini.

semangat politik keislaman para simpatisan partai-partai yang berlabel Islam jauh setelah Masyumi sendiri tenggelam.

Kemunculan simbol dan nama seperti digunakan dalam partai-partai Islam yang baru lahir itu telah menjadi warna tersendiri dalam proses komunikasi politik menjelang Pemilu 1999. Ia bukan hanya sebuah romantisisme sejarah, tapi juga menjadi saluran komunikasi untuk mengungkap simpati massa Islam yang pernah mengenal sejarah politik Islam Indonesia masa lalu. Simbol keislaman ini pula yang kemudian “diperdagangkan” sejumlah aktor komunikasi politik partai-partai itu. Dalam pidato-pidato politik yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra, misalnya, semangat keislaman ini selalu disebut-sebut sebagai pengikat ideologis, sekaligus menjadi *platform* partai.³

Masih dari kalangan modernis, Deliar Noer berhasil membidani kelahiran Partai Ummat Islam (PUI). Partai ini dikategorikan ke dalam kelompok modernis, paling tidak karena motor utama dan sejumlah jajaran kepengurusannya berasal dari kalangan dimaksud. Selain Deliar Noer sendiri dan Harun Alrasid yang menduduki jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Umum, di jajaran ketua dipasang nama-nama Mochtar Effendi, Abdurrahman Gunadirdja, Mursalin Dahlan, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan simbol bulan bintang sebagai lambang partai, partai ini juga dengan tegas menyebut berasas Islam dan dengan visi Islam sebagai rahmat.

Sikap perlawanannya terhadap orde baru tampak pada sikap politiknya yang meminta untuk mengaudit keuangan Golkar sekaligus membubarkan ketiga partai produk orde baru: Golkar, PDI, dan PPP. Sikap politiknya yang lain memperlihatkan hal yang sama, seperti menuntut pembubaran Dwifungsi ABRI sekaligus menuntut agar regim Soeharto dapat mempertanggungjawabkan atas kehancuran negeri ini selama dalam kekuasaannya. Sosok Deliar Noer sendiri memang dikenal sebagai individu yang tidak pernah merasa nyaman dengan hampir semua kebijakan politik pemerintahan Soeharto.

Jika dilihat dari pesan utama komunikasi politik serta sejumlah aktor yang berperan di dalamnya, partai-partai di atas memperlihatkan gairah sejarah politik masa lalu. Kelahiran partai-partai itu telah mengungkap

³ Lihat, antara lain, pidato politik Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra pada acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PBB Jawa Barat, akhir Agustus 1998.

kembali sejarah perjalanan panjang sejak tahun 1955 hingga terjadinya fusi partai tahun 1973. Sebab sejak peristiwa fusi itulah aspirasi Islam politik semakin tersumbat, sehingga kekuatan-kekuatan massa Islam pun tersembunyi dalam wadah baru bentukan orde baru yang pada kenyataannya hanya melahirkan konflik internal yang berkepanjangan. Selain nuansa sejarah yang tampak melatarbelakangi kelahiran partai-partai itu, sikap menggugat kebijakan dan tindakan politik orde baru juga menjadi salah satu warna cukup dominan.

Nuansa ingin berkuasa yang cenderung melahirkan konflik di antara sesama kekuatan Islam merupakan sisi lain yang terbaca sebagian kecil pihak yang mengamati momentum kelahiran partai-partai itu. Kemunculan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan PSII 1905 setelah kekuasaan orde baru berakhir adalah di antara contoh sederhana dua partai yang memiliki akar sejarah sama. Pada saat fusi 1973, PSII merupakan salah satu faksi yang akhirnya melebur ke dalam wadah PPP. Saat itu hanya ada satu PSII yang bergabung bersama dua partai lainnya di luar NU yaitu Parmusi dan Perti. Pada Pemilu 1999, kedua partai ini menggunakan warna bendera yang sama, lambang yang sama, kecuali penambahan “1905” pada salah satunya, dan dengan asas yang sama pula, yaitu *Dinul* Islam. Yang jelas berbeda adalah pimpinan, jajaran kepengurusan, serta sekretariatnya. Dalam daftar peserta Pemilu 1999, PSII muncul di bawah pimpinan Mulyana S. Muslim sebagai Ketua Umum dan Chalid Djamarini sebagai Sekretaris, sementara PSII 1905 muncul di bawah pimpinan H. Bustaman sebagai Presiden dan Muhammad Mufti sebagai Sekretaris Jenderal.

Sementara itu, dari arah lapisan tradisional, lahir pula sejumlah partai politik. Akan tetapi, tidak seperti pada Pemilu 1955 di mana NU tampil sebagai salah satu partai politik, menjelang pelaksanaan Pemilu 1999 ini, NU yang memiliki kekuatan massa lebih dari 30 juta orang itu tidak mengambil kebijakan untuk kembali merubah dirinya menjadi partai politik. Dengan merujuk pada semangat kembali ke *khittah* yang diputuskan lima belas tahun sebelumnya, NU tetap bertahan pada posisinya sebagai Ormas Islam yang tidak berorientasi pada aktivitas politik praktis. Padahal, iklim politik pasca orde baru ini dengan jelas memberikan peluang yang cukup besar bagi munculnya kekuatan-kekuatan politik baru setelah “terpasung” selama kurang lebih 30 tahun di bawah kekuasaan Soeharto, termasuk dari kalangan NU yang pernah memiliki sejarah politik yang menggembirakan pada Pemilu 1955. Karena itu, untuk menyalurkan aspirasi politik komunitas

nahdliyin, muncul pula sejumlah partai politik dengan basis konstituen yang terikat pada organisasi NU.

Inilah antara lain, fenomena menarik bersamaan dengan lahirnya sejumlah partai politik dari komunitas Muslim. Lahirnya partai-partai politik dari kalangan yang berbasis NU ini memperlihatkan masih tingginya gairah politik di balik pengambilan keputusan kembali ke *khittah* 1926. Disebut menarik paling tidak karena NU pernah menjadi partai politik sendiri, dan pada kurun 1980-an, NU sebaliknya telah menarik diri dari percaturan politik praktis. Hal ini pula yang sempat mengundang kontroversi baik di kalangan internal NU sendiri maupun di antara para pemerhati politik dari kalangan eksternal NU. Kontroversi sendiri sebetulnya tidak lebih dari pertanyaan berkaitan dengan konsistensi sikap politik NU sehubungan dengan adanya semangat kembali ke *Khittah 1926* di satu sisi, dan di sisi lain munculnya partai politik yang dipelopori sejumlah petinggi NU.

Berdasarkan hasil seleksi Tim Sebelas, sekurang-kurangnya ada empat partai politik berbasis NU yang tampil sebagai Organisasi Peserta Pemilu (OPP) pada Pemilu pertama sesudah berakhirnya kekuasaan orde baru, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di bawah pimpinan Matori Abdul Jalil, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) di bawah pimpinan Abu Hasan yang gagal meraih kepemimpinan NU pada tahun 1994, Partai Kebangkitan Umat (PKU) di bawah pimpinan Yusuf Hasyim, paman dan “musuh” lama Gus Dur, dan Partai Nahdlatul Umat (PNU) yang dipimpin oleh Syukron Ma'mun, seorang da'i bereputasi yang sering mengkritik sayap progresif NU.

Selain empat partai di atas, dalam Mukhtamarnya yang ke-4, PPP pun telah memilih seorang tokoh NU, Hamzah Haz, untuk memimpin partai tersebut. Hamzah telah mengalahkan saingannya dari unsur MI, AM Saefuddin. Kuatnya daya tarik PPP bagi warga NU -- dan bahkan dalam hal ini kelompok Islam pada umumnya -- bukan saja karena ketuanya adalah orang NU, tetapi juga karena lambang dan asasnya telah kembali kepada simbol Islam. Sejak Mukhtamar itu, partai ini telah kembali berasas Islam dan berlambang Ka'bah, sebuah simbol yang memiliki kesakralan tersendiri bagi kalangan Muslim. Karena itu, Hamzah Haz sendiri menilai bahwa penyebaran eksponen NU di berbagai kekuatan politik membuat NU bisa memperoleh akses yang lebih baik di bidang politik dan pemerintahan. Variasi warna partai ini pula yang akan menjadi “pintu” bagi masuknya kader politik NU dalam kekuasaan.

PPP akan tetap menjadi partai alternatif bagi sebagian warga NU yang telah berhasil menjadi elit yang relatif mapan mengendalikan partai. Kebingungan warga NU dalam menyikapi perkembangan politik terakhir khususnya seperti apa yang diperankan NU juga merupakan peluang potensial bagi PPP untuk mengajak kembali membangun rumah politik lama dengan penataan di sana-sini sehingga terkesan semakin menarik dan nyaman. Di sinilah arti penting kembalinya asas partai kepada Islam dan lambang Ka'bah, serta usaha-usaha rekonsiliasi politik para aktivis partai. Jadi, kalau saja PPP mampu membenahi problem internal seperti dialami sejak kelahirannya tahun 1973, maka sangat mungkin partai ini menjadi partai alternatif bagi penyaluran aspirasi politik masyarakat Muslim.

Selanjutnya di luar dua kategori modernis-tradisionalis di atas, Amien Rais berhasil membidani kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN). Partai ini sengaja tidak dimasukkan ke dalam dua kategori di atas karena inklusifismenya yang telah membuka pintu bagi masuknya kalangan di luar komunitas Muslim. Tetapi masih dibicarakan di sini hanya karena motor utamanya adalah sosok yang memiliki basis kalangan modernis Islam. Amien yang saat itu masih menduduki jabatan Ketua Umum PP Muhammadiyah muncul menjadi *public figure* karena sepak terjangnya dalam proses reformasi. Sebelumnya, setelah gerakan reformasi berhasil menumbangkan kekuasaan orde baru,

Meskipun pada awalnya tidak dimaksudkan untuk membentuk sebuah partai, embrio yang kemudian menjadi partai inklusif ini telah dirancang beberapa waktu menjelang gerakan reformasi berhasil mengakhiri kekuasaan Soeharto. Pada 14 Mei 1998, bersama sekitar 50 tokoh nasional lainnya, termasuk di antaranya Albert Hasibuan, Goenawan Mohammad, dan Faisal Basri, Amien membentuk satu wadah penyalur aspirasi rakyat, Majelis Amanat Rakyat (MARA). Argumennya sederhana saja. Karena struktur kekuasaan orde baru, dirasakan tidak begitu arif mendengarkan aspirasi rakyat. Padahal, untuk membangun demokrasi seperti menjadi cita-cita reformasi, bangsa ini memerlukan saluran aspirasi yang sehat dan mencerdaskan.

Karena tuntutan situasi politik yang terus berubah sangat cepat, maka sehari setelah PBB dideklarasikan, tepatnya pada tanggal 27 Juli 1998, Amien pun mengumumkan berdirinya sebuah partai politik yang untuk sementara bernama Partai Amanat Bangsa (PAB). Partai yang dibidani oleh tokoh-tokoh MARA ini dengan tegas tidak memfokuskan perhatiannya pada

ketokohan seseorang, tetapi lebih mengajak masyarakat untuk memperhatikan *platform* secara rasional. Nama pun dilempar ke forum. Mereka diminta mempertimbangkan berbagai usulan untuk nama partai yang sudah berdiri ini. Dari tiga nama yang diusulkan -- Partai Amanat Bangsa (PAB), Partai Amanat Rakyat (PAR), dan Partai Amanat Nasional (PAN) -- maka melalui proses *voting* akhirnya nama PAN yang disepakati. PAN yang untuk pertama kali dipimpin langsung Amien.

Masih di luar kategori modernis-tradisionalis, kelahiran Partai Keadilan (PK) juga telah mengundang perhatian masyarakat. Partai ini memiliki nuansa keislaman yang sangat kuat. Bahkan, jika dilihat dari latar belakang pimpinan dan jajaran para pengurusnya yang didominasi oleh alumni Timur Tengah, tidak terlalu salah jika kemudian muncul kesan sebagai partai generasi muda Islam yang mengusung semangat *Ihwanul Muslimin*. Secara sederhana profil para pendukungnya dapat ditelusuri pada sejarah kebangkitan remaja Muslim di Indonesia yang mulai menggeliat di awal dekade 1980-an. Gairah politik kaum muda Muslim ini telah memberikan warna baru percaturan politik nasional. Jika sebelumnya praktisi politik di Indonesia lebih dikesani identik dengan kalangan tua, maka kehadiran PK telah merubah kesan itu dengan menampilkan sosok muda dalam gairah politik yang sarat etika tapi tetap bersahaja.

PK didirikan di Jakarta pada 9 Agustus 1998 dengan berasaskan Islam. Semangat moralitas yang dibangun partai ini terlihat antara lain pada visi yang dirumuskannya sebagai “Wadah pendidikan politik bagi umat Islam khususnya, bangsa Indonesia umumnya, sekaligus tangga menuju kepemimpinan nasional dan terwujudnya masyarakat madani di Indonesia.” Untuk pertama kalinya partai ini dipimpin seorang muda, Nur Mahmudi Isma’il, yang pada Kabinet Gus Dur diangkat menjadi Menteri Kehutanan. Karena problem tidak mencapai batas minimal perolehan suara (*electoral threshold*) pada Pemilu 1999, maka menjelang Pemilu 2004, partai ini berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tanpa melakukan perubahan substansi secara signifikan. PKS terus melaju kencang di bawah pimpinan Hidayat Nurwahid yang sebelumnya menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Nurwahid kemudian terpilih menjadi Ketua MPR-RI pada proses politik hasil Pemilu 2004.

Penutup

Perjalanan Islam politik di Indonesia tampaknya masih akan menggunakan simbol-simbol yang dianggap merepresentasikan kehendak ideal dari agama yang dianutnya. Karena itu, bersamaan dengan lahirnya partai-partai politik seperti disebutkan di atas, beberapa partai lain yang mencirikan simbol keislaman juga tumbuh subur. Simbol-simbol verbal yang melekat dengan komunitas Islam seperti *tharikat*, *sunny*, *ahlussunnah wal jamaah*, *wahdatul ummah*, *abul yatama*, dan Islam serta muslim sendiri banyak digunakan para pendirinya menjadi nama partai. Di antara partai-partai itu ada yang muncul kembali setelah lama tenggelam karena kebijakan pemerintah masa lalu, dan sebagiannya lagi memang baru berdiri setelah orde baru bubar.

Untuk jangka waktu ke depan, agama masih akan memainkan fungsi simboliknya dalam proses politik yang diperankan para aktivis politik. Agama, sederhananya, merupakan kendaraan strategis untuk memperlicin jalan menuju cita-cita politik, terutama pada negara yang “seluruh” penduduknya beragama. Simbol-simbol inilah yang banyak digunakan para elit politik untuk membangun komunikasi politik dengan konstituennya.

DAFTAR BACAAN

- Achmad, Amrullah (editor). 1983. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta : PLP2M.
- , 1985. *Dakwah Islam dan Transformasi Sosial Budaya*. Yogyakarta : PLP2M.
- Alfian. 1991. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dan Nimmo and Keith R. Sanders (editor). 1981. *Handbook of Political Communication*. London: Sage Publication.
- Douglas E. Ramage. 1995. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*. New York: Routledge.
- Fachry Ali dan Bachtiar Effendi. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung : Mizan.
- Maswadi Rauf. 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Melvin L. DeFleur (et.al.). 1993. *Fundamentals of Human Communication*. California : Mayfield Publishing Company.
- Muhammad Asfar. 1996. "Ulama dan Politik: Perspektif Masa Depan", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5 Vol. VI, Tahun 1996.
- Musa Kazhim dan Alfian Hamzah. 1999. *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Philip Althoff dan Michael Rush. 1997. *Pengantar Sosiologi Politik* (terjemahan Kartini Kartono). Jakarta: Rajawali Press.
- Zuhri, Saifuddin. 1982. *Unsur Politik dalam Dakwah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.